



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

Perancangan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan EFA (Excel For Accounting)

Wiwik Andriani¹, Desi Handayani², Roni Putra³, Dini Marisa⁴

¹Politeknik Negeri Padang, Departemen Akuntansi, email: wiwikandrianipnp@gmail.com

²Politeknik Negeri Padang, Departemen Akuntansi, email: ci_e@yahoo.com

³Politeknik Negeri Padang, Departemen Akuntansi, email: m.putra@gmail.com

⁴Politeknik Negeri Padang, Departemen Akuntansi, email: dinimarisa6@gmail.com

Abstract

Local government is a part of the government in Indonesia where local government is translated into district and city governments. In West Sumatra, there are 19 (nineteen) districts/cities. This government has prepared financial reports but has not yet analyzed the financial reports. From interviews with several local governments, the analysis of financial reports has not been maximally applied. In this study, a model was created to analyze financial statements using Microsoft Excel. The ratio analysis used is the Decentralization Ratio, Regional Financial Dependency Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Regional Original Income Effectiveness Ratio, Regional Tax Effectiveness Ratio. After preparing the financial statements, an analysis based on the above ratio can be made to the financial statements so that users or stakeholders can easily understand the performance of the local government for 1 (one) period.

Keywords: Local Government, Financial Ratio Analysis, Applications (Microsoft Excel)

Abstrak

Pemerintah daerah merupakan bagian pemerintahan di Indonesia dimana pemerintah daerah dijabarkan menjadi pemerintahan kabupaten dan kota. Di Sumatera Barat terdapat 19 (sembilan belas) kabupaten/kota. Pemerintahan ini sudah menyusun laporan keuangan namun belum melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Dari wawancara dengan beberapa pemerintah daerah analisis terhadap laporan keuangan belum diterapkan secara maksimal. Dalam penelitian ini dibuat model untuk melakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel. Analisis ratio yang digunakan yaitu Ratio Desentralisasi, Ratio Ketergantungan Keuangan Daerah, Ratio Kemandirian Keuangan Daerah, Ratio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Ratio Efektifitas Pajak Daerah. Setelah penyusunan laporan keuangan maka dapat dibuatkan analisis berdasarkan ratio di atas terhadap laporan keuangan sehingga pengguna atau stakeholders mudah memahami kinerja pemerintah daerah selama 1 (satu) periode.

Keywords: *Pemerintah Daerah, Analisis Rasio Keuangan, Aplikasi (Microsoft Excel)*

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah (pemda) merupakan salah satu alat dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sendiri sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan negara. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu dengan menerapkan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disajikan harus berkualitas, yaitu laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat yang benar, dilaporkan secara lengkap, dan diaudit secara independen.

Analisa laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Perbedaan analisis laporan keuangan bisnis dan sektor publik terletak pada objeknya. Penggunaan analisis rasio keuangan pada sektor publik belum begitu banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya [2]. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemda perlu dilaksanakan, meskipun kaidah akuntansi dalam laporan keuangan pemda berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki organisasi privat.

Dilansir dari website tanahdatar.go.id Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang meraih penghargaan tingkat nasional, penghargaan ini diberikan karena Kabupaten Tanah Datar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pencapaian opini WTP ini diraih oleh Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2012-2019. Kabupaten Tanah Datar juga mengalami peningkatan PAD pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,42%. namun hingga saat ini dalam hal analisa laporan keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar belum menerapkan model rasio analisis laporan keuangan pemerintah daerah yang salah satu tujuannya untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Tentunya model rasio keuangan ini diharapkan dapat membantu para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah dalam memahami dan menganalisis laporan keuangan.

2. Tinjauan Pustaka

a. Rasio Keuangan

Ulum mengungkapkan analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Beberapa rasio dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah [6]. Jenis-jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots \dots \dots [4]$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Daerah

No	Persentase	Kategori
1	0% - 10%	Sangat Kurang
2	10% - 20%	Kurang
3	20% - 30%	Cukup
4	30% - 40%	Sedang
5	40% - 50%	Baik
6	>50%	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol [5]

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keu. Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots [4]$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

No	Persentase	Kategori
1	0% - 10%	Sangat Rendah
2	10% - 20%	Rendah
3	20% - 30%	Sedang
4	30% - 40%	Cukup
5	40% - 50%	Tinggi
6	>50%	Sangat tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol [5]

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapat transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Tranf. Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\% \dots [4]$$

Tabel 3. Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Seding	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Halim [2]

- 1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada.

4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \dots \dots [4]$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Sangat efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90%-99%
- Kurang efektif : 75%-89%
- Tidak efektif : < 75%

5. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Selain analisis rasio efektivitas dan efisiensi PAD, kita juga dapat melakukan analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \dots \dots [4]$$

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

b. Microsoft Excel

Microsoft excel merupakan program *spreadsheet* yang digunakan untuk mengolah data dengan memanfaatkan fasilitas formula atau rumus, di mana berisi beberapa fungsi yang telah tersedia. Fungsi-fungsi ini dikelompokkan dalam beberapa kelompok untuk menyesuaikan jenis data yang dapat diolah dengan menggunakan masing-masing fungsi tersebut [3].

3. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan. Studi deskriptif sering didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan ciri-ciri seseorang, kejadian, atau situasi [1]. Menurut Sugiyono (2003) dalam Mandey (2015) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen), tanpa membuat perbandingan, atau menggabungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

b. Tempat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk membuat model analisis laporan keuangan pemerintah daerah maka penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

alasan dari pemilihan lokasi penelitian ini, yaitu Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang meraih penghargaan tingkat nasional, penghargaan yang diraih delapan kali berturut-turut terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

c. Sumber Data

Sumber data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh orang lain bukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian [1]. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 sampai dengan 2018 yang penulis dapatkan dari *website* www.bps.go.id

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada pemerintah daerah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan pengumpulan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar berupa data umum dan data khusus. Data umum yang penulis maksud yaitu gambaran umum Kabupaten Tanah Datar serta data khusus berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini ratio yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 4. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Tanah Datar
Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Total PAD (Rp)	Total PD (Rp)	Derajat Desentralisasi	Tingkat Desentralisasi	Keterangan
2016	118.971.143	1.188.763.795	10,01%	Kurang	Kontribusi PAD Kecil Terhadap PD
2017	172.812.023	1.343.221.487	12,87%	Kurang	Kontribusi PAD kecil terhadap PD
2018	115.914.188	1.230.335.932	9,42%	Sangat Kurang	Kontribusi PAD terlalu kecil terhadap PD
	135.899.118	1.254.107.071	10,76%		

Sumber : BPS SUMBAR (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dilihat dari rasio derajat desentralisasi dikategorikan kurang. Dimulai pada tahun 2016 rasio derajat desentralisasi Kabupaten Tanah Datar sebesar 10,01%, naik menjadi 12,87 pada tahun 2017. Tahun 2018 rasio derajat desentralisasi Kabupaten Tanah Datar sebesar 9,42%, secara keseluruhan dapat dikatakan kemampuan keuangan Kabupaten Tanah Datar masih kurang, karenan berada dalam skala interval 10%-20%.

dapat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi selama tiga tahun terakhir pada Kabupaten Tanah Datar masih kurang karena masih berada pada skala interval 10%-20% dan ini menunjukkan bahwa PAD memiliki kemampuan yang kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

**Tabel 5. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2016-2018**

Tahun	Pend. Transfer (Rp)	Total PD (Rp)	Rasio ketergantungan	Tingkat Ketergantungan	Keterangan
2016	963.487.573	1.188.763.795	81,05%	Sangat Tinggi	Tingkat ketergantungan daerah masih tinggi
2017	928.980.449	1.343.221.487	69,16%	Sangat Tinggi	Tingkat ketergantungan daerah masih tinggi
2018	944.906.738	1.230.335.932	76,80%	Sangat Tinggi	Tingkat ketergantungan daerah masih tinggi
	945.791.603	1.254.107.071	75,67%		

Sumber : BPS SUMBAR (data diolah)

Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 4.2 hasil perhitungan dari rasio ketergantungan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, kecenderungan kondisi keuangan untuk tiga tahun terakhir sangat tinggi dengan presentasi mencapai angka rata-rata 75,67%. Terhitung sejak tahun 2016 rasio ketergantungan keuangan sudah mencapai 81,05%, mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 69,16% dan pada tahun 2018 rasio ketergantungan keuangan daerah meningkat menjadi 76,80%. Secara keseluruhan data menunjukkan bahwa rasio ketergantungan pada tiga tahun terakhir pada Kabupaten Tanah Datar masih sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui dana perimbangan atau dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Tanah Datar masih sangat tinggi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel 6. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2016-2018**

Tahun	Total PAD	Dana Perimbangan	Rasio kemandirian	Tingkat Kemandirian	Keterangan
2016	118.971.143	1.056.977.283	11,26%	Rendah Sekali	Tingkat ketergantungan tinggi dari PAD
2017	172.812.023	1.041.225.557	16,60%	Rendah Sekali	Tingkat ketergantungan tinggi dari PAD
2018	115.914.188	987.211.384	11,74%	Rendah Sekali	Tingkat ketergantungan tinggi dari PAD

Tahun	Total PAD	Dana Perimbangan	Rasio kemandirian	Tingkat Kemandirian	Keterangan
	135.899.118	1.028.471.408	13,20%		

Sumber : BPS SUMBAR (data diolah)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah selama tiga tahun pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

e.

**Tabel 7. Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2016-2018**

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Nilai Efektivitas	Keterangan
2016	118.971.143	115.232.849	103,24%	Sangat Efektif	PAD efektif
2017	172.812.023	128.397.031	134,59%	Sangat Efektif	PAD efektif
2018	115.914.188	152.110.032	76,20%	Kurang Efektif	Kurang merealisasikan PAD dengan efektif
	135.899.118	131.913.304	104,68%		

Sumber : BPS SUMBAR (data diolah)

Dilihat dari perhitungan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa efektivitas PAD keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 adalah sebesar 103,24%, tahun 2017 sebesar 134,59%, tahun 2018 sebesar 76,20%, dan pada tahun 2019 sebesar 88,79%. Efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berjalan dengan sangat efektif karena nilai rasio efektivitasnya diatas 100%. Untuk tahun 2018 dan 2019 efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar berjalan dengan kurang efektif karena nilai yang diperoleh dibawah 90%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 4 efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Tanah Datar sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya sudah 100,71%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya

e. Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Daerah

**Tabel 8. Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2016-2018**

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efektivitas	Nilai Efektivitas	Keterangan
2016	11.771.072	11.946.601	98,53%	Efektif	Pajak daerah sesuai
2017	16.523.395	12.932.920	127,76%	Sangat Efektif	Pajak daerah sesuai
2018	19.847.312	17.894.893	110,91%	Sangat Efektif	Pajak daerah sesuai
	16.047.259	14.258.138	112,40%		

Sumber : BPS SUMBAR (data diolah)

Berdasarkan dari tabel 5 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 rasio efektivitas pajak daerah sudah lebih dari 90% yaitu sebesar 98,53% dan sudah bisa dikatakan efektif. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 127,76% dan sudah bisa dikatakan sangat efektivitas. Pada tahun 2018 rasio efektivitas pajak daerah juga sudah melebihi 100%, sehingga juga sudah bisa dikatakan sangat efektif dengan rasio efektivitas sebesar 110,91%. Kemudian untuk tahun 2019 mengalami penurunan rasio efektivitas menjadi 86,57%. Secara keseluruhan empat tahun terakhir rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Tanah Datar sudah sangat efektif dengan rata-rata 105,94%.

Model Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah

Model yang penulis maksud disini yaitu bentuk sederhana perhitungan rasio laporan keuangan menggunakan *Microsoft excel*. Contoh format perhitungan yang penulis buat adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Model Format Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah

 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Komponen Penerimaan (Ribu Rupiah)			
			Berlaku tahun 2018
No	Komponen Penerimaan	Nilai	
		Anggaran	Realisasi
A	Pendapatan Daerah	Rp 1.260.633.135,00	Rp 1.230.335.932,00
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 152.110.032,00	Rp 115.914.188,00
	1.1 Pajak Daerah	Rp 17.894.893,00	Rp 19.847.312,00
	1.2 Retribusi Daerah	Rp 9.822.643,00	Rp 9.163.333,00
	1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 30.292.000,00	Rp 17.853.819,00
	1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 94.100.496,00	Rp 69.049.724,00
2	Dana Perimbangan	Rp 985.569.196,00	Rp 944.906.738,00
	2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 16.769.622,00	Rp 12.236.969,00
	2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 695.555.745,00	Rp 695.555.745,00
	2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 273.243.829,00	Rp 237.114.024,00

3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 122.953.907,00	Rp 169.515.006,00
	3.1 Pendapatan Hibah	Rp 450.000,00	Rp 127.210.360,00
	3.2 Dana Darurat	Rp -	Rp -
	3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lain	Rp 39.954.612,00	Rp 42.304.646,00
	3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 82.549.295,00	Rp -
	3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp -	Rp -
	3.6 Lainnya	Rp -	Rp -
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 73.743.614,00	Rp 87.015.167,00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 73.743.614,00	Rp 87.015.167,00
2	Jumlah Pembiayaan Daerah Lainnya	Rp -	Rp -
	Jumlah Penerimaan Daerah	Rp 1.334.376.749,00	Rp 1.317.351.099,00
*) Data APBD			

Sumber : Diolah Sendiri (2020)

Tabel 10. Model Format Perhitungan Rasio dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

No	Rasio	Persentase	Tingkat	Keterangan
1	Rasio Derajat Desentralisasi	9,42%	Sangat Kurang	Kontribusi PAD terlalu kecil terhadap pendapatan daerah
2	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	76,80%	Sangat tinggi	Tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer sangat tinggi
3	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	11,74%	Instruktif	Peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah
4	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	76,20%	Kurang efektif	Kurang merealisasikan PAD dengan efektif sesuai dengan target yang diharapkan
5	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	110,91%	Sangat efektif	Telah merealisasikan pajak daerah dengan efektif sesuai dengan target yang diharapkan

Sumber : Diolah Sendiri (2020)

5. Kesimpulan

1. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 rasio derajat desentralisasi Kabupaten Tanah Datar sebesar 10,01%, naik menjadi 12,87% pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 rasio derajat desentralisasi Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan menjadi sebesar 9,42%.

2. Berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar kecenderungan kondisi keuangan untuk empat tahun terakhir sangat tinggi dengan presentasi mencapai angka rata-rata 75,12%. Terhitung sejak tahun 2016 rasio ketergantungan keuangan sudah mencapai 81,05%, mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 69,16%, dan pada tahun 2018 rasio ketergantungan keuangan daerah mengalami kenaikan menjadi 76,80%.

3. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dilihat dari rasio kemandirian termasuk dalam kategori masih kurang dengan pola hubungan instruktif maksudnya peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%.

4. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dilihat dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya sudah 100,71%.
5. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dilihat dari rasio efektivitas pajak daerah secara keseluruhan empat tahun terakhir sudah sangat efektif dengan rata-rata 105,94%.

Daftar Pustaka

- [1] Ghozali, Imam. *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. 2016
- [2] Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. 2004
- [3] LITBANG MADCOMS. 2017. Penerbit Andi Yogyakarta
- [4] Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP TSIM YKPN. 2019
- [5] Sartika, Novira. *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti*. 2019
- [6] Ulum, Ihyaul. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Bumi Aksara. 2012